

RENJA PERUBAHAN

BKPSDM

**RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
MAHAKAM ULU**



TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
4.1. Program dan Kegiatan	31
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM.....	34
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan I Tahun 2025.....	12
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	25
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Belanja Perubahan SKPD Tahun 2025.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Renja Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan

awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD;

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

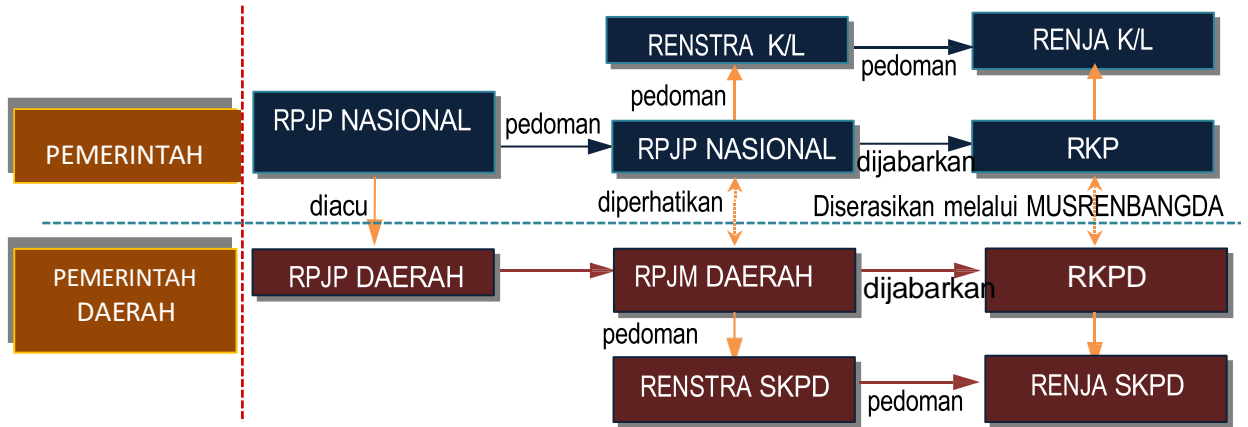
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD;

Tahap Penyajian rancangan Renja SKPD merupakan sistematis penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya. Proses penyusunan Renja SKPD pada tingkatan SKPD secara garis besar meliputi :

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD;
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju;
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Materi menyusun Rancangan Perubahan RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RABPN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan

seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA SKPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh SKPD harus menyusun RENSTRA SKPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA SKPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA SKPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-SKPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal SKPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, penyajian renja perangkat daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan terjaminnya konsistensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun APBD Perubahan 2025 dengan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta dengan dokumen anggarannya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025, meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuanserta sistematika penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta merumuskan Program dan Kegiatan yang didalamnya dirumuskan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, target kinerja, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana dari Program dan Kegiatan SKPD yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi program dan kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Turunan Renja APBD pergeseran sampai dengan Triwulan 1 SKPD Tahun 2025 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Untuk Belanja Operasi Tahun 2025 semester satu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.15.990.065.616,-

b. Belanja Modal

Belanja Modal untuk Tahun 2025 terdiri atas Belanja Modal

RP. 1.591.054.600,-

(Lihat Tabel 2.1)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Mahakam Ulu

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	EALUASI REALISASI TAHUN 2025 TW I					
		INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF MURNI APBD PERGESERAN (RP)	TARGET CAPAIAN KINERJA		NILAI REALISASI S/D TW1 (Rp)	SISA ANGGARAN (RP)
				Nilai	Satuan		
5.03	KEPEGAWAIAN						
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah"					
5.03.01.2	BELANJA PEGAWAI						
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.245.121.416	43	Orang	1.672.534.459	6.572.586.957
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Honor Pengelola Keuangan SKPD	338.160.000	15	Orang	84.180.000	253.980.000
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.245.336.000	12	Laporan	199.560.000	1.045.776.000
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan RKA SKPD Jumlah Penyesunan Perubahan RKA SKPD Jumlah Laporan Ikhtisar					
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.696.600	4	Dokumen	-	60.696.600
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.948.200	1	Dokumen	-	2.948.200
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	3.803.200	1	Dokumen	-	3.803.200

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Mahakam Ulu

5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.980.000	12	Dokumen	-	67.980.000
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun					
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	"Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.265.900	1	Laporan	-	1.265.900
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	122.769.000	300	Dokumen	-	122.769.000
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	74.435.350	500	Orang	-	74.435.350
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.047.500	1	Paket	-	2.047.500
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140.978.200	1	Paket	-	140.978.200
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	117.525.000	3	Paket	4.811.000	112.714.000
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.731.100	3	Paket	-	9.731.100
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.119.800	1	Laporan	-	8.119.800
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	848.168.000	1	Laporan	40.559.200	807.608.800
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	105.000.000	1	Dokumen	-	105.000.000

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Mahakam Ulu

	pada SKPD	Kepegawaian					
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.902.000	312	Unit	-	2.902.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	1	Laporan	-	4.500.000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	158.720.000	12	Laporan		158.720.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66.586.750	14	Unit	-	66.586.750
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.950.000	0	Unit	-	9.950.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	105.969.000	1	Dokumen	75.036.000	30.933.000

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kabupaten Mahakam Ulu

5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.864.682.400	1	Dokumen	-	1.864.682.400
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	117.535.500	1	Dokumen	-	117.535.500
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	278.875.000	1	Lembaga	-	278.875.000
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	105.419.000	1	Dokumen	83.637.844	21.781.156
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.396.000	1	Dokumen	-	17.396.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	35.027.000	2	Laporan	-	35.027.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	207.711.000	100	Dokumen	-	207.711.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	95.967.300	5	Dokumen	-	95.967.300
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	57.036.700	1.000	Orang	-	57.036.700
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	961.938.000	3	Dokumen	77.333.364	884.604.636
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	523.275.000	30	Orang	-	523.275.000
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	467.040.400	240	Orang	35.016.602	432.023.798

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Belanja Operasi dan Belanja Modal SKPD Tahun 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kabupaten Mahakam Ulu

5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	87.889.000	30	Orang	40.943.751	46.945.249
5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	45.155.000	2	Laporan	-	45.155.000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	59.137.200	1	Dokumen	-	59.137.200
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	151.291.000	105	Dokumen	92.849.000	58.442.000
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77.088.800	1153	SKP	-	77.088.800
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	78.268.000	10	Orang	-	78.268.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	66.528.000	10	Orang	40.019.200	26.508.800
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	"Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian	143.523.000	10	Laporan	-	143.523.000
5.03.02.2.04.0004	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	pelanggaran disiplin ASN"	83.245.000	1	Dokumen	-	83.245.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	314.378.900	95	Orang	71.305.164	243.073.736

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru dalam ketentuan masih mengacu RPJMD Kabupaten Induk.

Namun sampai dengan sampai saat ini belum ada kajian terhadap Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA sebagai berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025 Januari - Juni		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Formasi seleksi Penerimaan CPNS	Orang	200	76	38%
2	Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat	Orang	300	100	35%
3	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Orang	200	200	100%

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu adalah SKPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berdomisili di Ibukota Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu.

Jumlah Sumber Daya Manusia pendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Non Struktural

:

Tahun 2023			Tahun 2025		
Eselon II.b	1	Orang	Eselon II.b	1	Orang
Eselon III.a	1	Orang	Eselon III.a	1	Orang
Eselon III.b	2	Orang	Eselon III.b	2	Orang
Eselon IV.a	8	Orang	Eselon IV.a	2	Orang
PNS Staf	9	Orang	PNS JF	13	Orang
Jumlah	21	Orang	Jumlah	19	Orang

2. Jumlah Pegawai TNP Per 1 Januari 2025 :

S1, 14 Orang
 D1, 1 Orang
 DI/SLTA, 11 Orang
 SD, 1 Orang
 (Total 27 Orang)

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BKPSDM) Tahun 2023 berjalan cukup baik dengan realisasi kinerja keuangan mencapai 88,21 %.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan hambatan- hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak PNS yang perlu ditingkatkan kapasitas kompetensinya guna untuk tercapainya kinerja aparatur yang profesional dan kompeten;l
2. Sebagian besar PNS belum memahami pembuatan SKP SIAN;
3. Belum terciptanya sinkronisasi data yang baik antara pengelolaan data mutasi dan jumlah aktual PNS di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Tingkat kelulusan yang rendah dalam pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK;
5. Masih adanya kasus Indislpiner PNS.
Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :
6. Perlu diadakan sosialisasi mengenai PP 94 tahun 2021 untuk meningkatkan pemahaman mengenai penanganan masalah yang terkait dengan Disiplin dan sanksi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Perlu diadakan Sosialisasi mengenai Peraturan Kepegawaian (Evaluasi SKP, evaluasi kinerja pegawai, Pensiun, Mutasi Pegawai dan Alih Status);

8. Perekrutan Pegawai melalui tes CPNS/PPPK sesuai dengan kebutuhan;
9. Pegawai BKPSDM perlu mengikuti Diklat/Bimtek sesuai dengan Tupoksi;
10. Perlu adanya Dukungan Publikasi Secara elektronik (website) untuk pelayanan informasi kepegawaian (Upgrade Website).
11. Perlu diadakan Reward Berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja dan Prestasi Pegawai demi tercapainya Produktifitas dan Kesejahteraan Pegawai.

6.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak didistribusikan ke SKPD-SKPD.

6.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak sebagai kapasitas untuk mengakomodir Program dan Kegiatan Masyarakat untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja, akan tetapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsinya merupakan pengejawantahan kepentingan publik khususnya Pegawai Negeri Sipil karena tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan urusan kepegawaian di tingkat daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan provinsi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam RPJMD 2021-2026 pada Misi 4 : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih kabupaten Mahakam Ulu Tahun (2021-2026), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mahakam Ulu menyusun langkah - langkah kegiatan strategis guna tercapainya penataan atau penempatan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sesuai dengan Kompetensi dan Terlaksananya Pemerintahan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tahun (2021-2026) Langkah - langkah Kegiatan strategis antara lain meliputi :

1. Pendataan Pegawai Negeri Sipil Secara langsung dan menyeluruh pada seluruh SKPD di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu dan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
2. Peningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Diklat - Diklat;
3. Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi / JPT (Assesment) yang mengacu pada sistem MERIT sesuai dengan :
 - a. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah;
 - c. Perka BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman penataan Pegawai Negeri Sipil.

4. Pemberian Reward/Penghargaan berupa Satya Lencana bagi Pegawai Negeri sipil yang memenuhi kriteria.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Tujuan Renja SKPD disusun sebagai bahan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yakni :

1. Terwujudnya komposisi aparatur yang sesuai dengan beban kerja;
2. Terwujudnya tata kelola dan administrasi kepegawaian yang baik dan transparan;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas.
4. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan yang direncanakan pada 2025 terdiri dari 2(Dua) Unsur Penunjang urusan Pemerintahan, 3(tiga) Program ,13(Tiga belas) Kegiatan, dan 45(empat Puluh Lima) Sub. Kegiatan

yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 21 Tahun 2011, dan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahyakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Perumusan Bahan Kebijakan dan Pengelolaan data dan Informasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;

2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN;
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- Pengelolaan Promosi ASN.

3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pembinaan Disiplin ASN;
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kab. Mahakam Ulu

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 sebesar Rp. 24.315.807.616,- yang terdiri dari :

No.	Belanja	Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 8.563.547.216,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 14.161.205.800,-
3	Belanja Modal	Rp.1.591.054.600,-
JUMLAH		Rp. 24.315.807.616,-

Sedangkan pagu indikatif Anggaran Perubahan Belanja Operasional dan Belanja Modal untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

(lihat tabel 3.1)

TABEL 3.1

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025						SUMBER DANA
		INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF MURNI (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF PERUBAHAN (Rp)	Bertambah/Berkurang Dari Pagu TA 2025	
				Nilai	satuan			
5.03	KEPEGAWAIAN							
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah"						
5.03.01.2	BELANJA PEGAWAI							
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.245.121.416	43	Orang	8.563.547.216	318.425.800	APBD-P
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Honor Pengelola Keuangan SKPD	338.160.000	15	Orang	343.080.000	4.920.000	APBD-P
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.245.336.000	12	Laporan	1.245.336.000	-	APBD-P
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan RKA SKPD Jumlah Penyesunan Perubahan RKA SKPD Jumlah Laporan Ikhtisar					-	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.696.600	4	Dokumen	60.696.600	-	APBD-P
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.948.200	1	Dokumen	2.948.200	-	APBD-P
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	3.803.200	1	Dokumen	3.803.200	-	APBD-P
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian	67.980.000	12	Dokumen	67.980.000	-	APBD-P

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersusun					-	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	"Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.265.900	1	Laporan	1.265.900	-	APBD-P
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-	
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	122.769.000	300	Dokumen	176.292.000	53.523.000	APBD-P
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	74.435.350	500	Orang	366.670.000	292.234.650	APBD-P
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						-	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.047.500	1	Paket	2.047.500	-	APBD-P
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140.978.200	1	Paket	285.058.200	144.080.000	APBD-P
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	117.525.000	3	Paket	117.525.000	-	APBD-P
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.731.100	3	Paket	9.731.100	-	APBD-P
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.119.800	1	Laporan	8.119.800	-	APBD-P
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	848.168.000	1	Laporan	848.168.000	-	APBD-P

		SKPD						
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	105.000.000	1	Dokumen	105.000.000	-	APBD-P
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-	
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.902.000	312	Unit	2.902.000	-	APBD-P
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	1	Laporan	4.500.000	-	APBD-P
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	158.720.000	12	Laporan	169.720.000	11.000.000	APBD-P
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66.586.750	14	Unit	146.822.900	80.236.150	APBD-P
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.950.000	0	Unit	13.400.000	3.450.000	APBD-P
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						-	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						-	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil	105.969.000	1	Dokumen	105.969.000	-	APBD-P

	untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.864.682.400	1	Dokumen	1.864.682.400	-	APBD-P
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	117.535.500	1	Dokumen	120.445.500	2.910.000	APBD-P
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	278.875.000	1	Lembaga	359.152.000	80.277.000	APBD-P
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	105.419.000	1	Dokumen	256.297.000	150.878.000	APBD-P
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.396.000	1	Dokumen	52.188.000	34.792.000	APBD-P
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						-	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	35.027.000	2	Laporan	35.027.000	-	APBD-P
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	207.711.000	100	Dokumen	237.508.000	29.797.000	APBD-P
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	95.967.300	5	Dokumen	223.877.300	127.910.000	APBD-P
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						-	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	57.036.700	1.000	Orang	57.036.700	-	APBD-P
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	961.938.000	3	Dokumen	1.129.838.000	167.900.000	APBD-P

		Center						
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	523.275.000	30	Orang	715.060.000	191.785.000	APBD-P
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	467.040.400	240	Orang	3.206.682.400	2.739.642.000	APBD-P
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	87.889.000	30	Orang	187.278.000	99.389.000	APBD-P
5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	45.155.000	2	Laporan	45.155.000	-	APBD-P
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						-	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	59.137.200	1	Dokumen	59.137.200	-	APBD-P
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	151.291.000	105	Dokumen	151.291.000	-	APBD-P
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77.088.800	1153	SKP	77.088.800	-	APBD-P
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	78.268.000	10	Orang	222.100.000	143.832.000	APBD-P
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	66.528.000	10	Orang	432.276.800	365.748.800	APBD-P
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	"Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian	143.523.000	10	Laporan	466.788.000	323.265.000	APBD-P
5.03.02.2.04.0004	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	pelanggaran disiplin ASN"	83.245.000	1	Dokumen	217.452.000	134.207.000	APBD-P
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						-	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						-	

5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						-	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	314.378.900	95	Orang	1.548.863.900	1.234.485.000	APBD-P
TOTAL			17.581.120.216			24.315.807.616	6.734.687.400	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah mempedomani Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ,merupakan dokumen yang secara substansial adalah penerjemahan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Disamping itu, Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini merupakan gambaran program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung program pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 8.563.547.216,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 14.161.205.800,-
3	Belanja Modal	Rp.1.591.054.600,-
JUMLAH		Rp. 24.315.807.616,-

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas di tahun 2025, sehingga kedepan diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan menjadi optimal dengan ditunjang oleh pendanaan yang memadai. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Ujoh Bilang, 28 April 2025 Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kab. Mahakam Ulu,

A circular official stamp of the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu is visible. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU' and 'BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si